

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Stunting adalah kondisi dimana tinggi badan anak, berdasarkan usianya, berada di bawah -2 Standar Deviasi (SD) dari kurva pertumbuhan yang ditetapkan oleh WHO, dimana kondisi ini disebabkan oleh kekurangan asupan nutrisi yang memadai dan/atau infeksi yang berulang atau kronis yang terjadi selama 1.000 Hari Pertama Kehidupan (World Health Organization, 2020). Kekurangan gizi tersebut dapat dimulai sejak bayi dalam kandungan dan berlanjut pada awal kehidupan setelah kelahiran. Namun, dampak *stunting* biasanya baru terlihat ketika anak telah mencapai usia 2 tahun. (Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), 2018).

Data menunjukkan bahwa persentase *stunting* di Indonesia untuk tahun 2022 berada pada angka 24,4% kemudian tahun 2023 menurun hingga 21,6% dari populasi balita seluruh pelosok nusantara, dan untuk wilayah Kabupaten Garut berkisar pada 23,6% dari jumlah populasi bayi dibawah lima tahun (Rilis Humas Pemdakab Garut, 2023). Kemudian untuk saat ini 6,57% dari populasi bayi dibawah lima tahun pada wilayah kerja PKM Citeras masih mengalami *stunting* (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021). Dengan adanya kasus tersebut Pemerintah Kabupaten Garut memiliki target untuk menurunkan angka *stunting* di tahun 2024 hingga 13%. Untuk mencapai target menurunkan angka *stunting* hingga dibawah 13%, Pemerintah Kabupaten Garut memerintahkan kepada setiap Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) menjalankan intervensi yang dikhususkan pada penanganan *stunting*. Seperti wilayah kerja Puskesmas Citeras dengan program dan kegiatan penyuluhan dan konseling gizi terkait *stunting*, Pemberian

Makanan Tambahan (PMT) balita dan ibu hamil, deklarasi *Open Defecation Free* (ODF), pemberian Vitamin A dan obat cacing, pemantauan status gizi di posyandu dan garam beryodium, serta pembentukan Kawasan Desa Pangan Gizi Lestari. Semua program dan kegiatan tersebut tidak lepas dari kerjasama antara pihak Puskesmas Kecamatan dengan Kader PKK yang ada di desa (UPT Puskesmas Citeras, 2021).

Desa Sukarasa yang menjadi salah satu desa di wilayah kerja Puskesmas Citeras yang masih memiliki balita *stunting* yang pada tahun 2018 pernah menjadi lokus atau lokasi khusus *stunting* dengan lebih dari 70 anak yang terdeteksi *stunting*, dan akhirnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dan Dinas Kesehatan (Amelia, 2023). Untuk Tahun 2021 sendiri angka *stunting* di Desa Sukarasa telah menurun menjadi 34 orang (UPT Puskesmas Citeras, 2021). Data terbaru ditemukan oleh Puskesmas Citeras bahwa pada tahun 2023 angka *stunting* di Desa Sukarasa berjumlah 32 orang atau berkisar pada 13,3%.



Gambar 1. 1 Grafik Penurunan Angka Stunting Desa Sukarasa

Dari grafik diatas terlihat terdapat penurunan angka stunting dari tahun 2018 ketika Desa Sukarasa menjadi lokus stunting, hingga saat ini tahun 2024 Desa Sukarasa telah keluar dari status lokus stunting wilayah Kabupaten Garut. Saat ini Kader PKK berperan sebagai salah satu ujung tombak penanganan *stunting* di wilayah pedesaan. Kader PKK Desa Sukarasa berupaya semaksimal mungkin untuk menangani permasalahan tersebut dengan melakukan berbagai intervensi yang sejalan dengan program pemerintah dan menggalakannya dengan berbasis masyarakat pada setiap kegiatan Posyandu. Dalam kegiatan Posyandu ini Kader PKK Desa Sukarasa dapat melakukan monitoring terhadap perkembangan penanganan *stunting* pada setiap bulannya. Hasil yang didapatkan juga telah berhasil tahap demi tahap telah menurunkan angka *stunting* di Desa Sukarasa dari tahun ke tahunnya seperti yang tertera pada grafik diatas.

Dengan pamrih yang tidak seberapa Kader PKK selalu mengusahakan yang terbaik dalam menjalankan tugas yang salah satunya adalah amanat penanganan *stunting* di wilayah Desa Sukarasa. Dalam menjalankan tugas tersebut Kader PKK senantiasa bekerjasama semaksimal mungkin memanfaatkan jaringan sosial yang dimilikinya melalui kerjasama maupun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menangani permasalahan *stunting*. Dari hal tersebut mulai tercermin modal sosial menjembatani atau *bridging social capital* yang dimiliki oleh Kader PKK, tetapi hanya dalam penilaian subjektif saja. Untuk menggali lebih dalam *bridging social capital* yang dimiliki oleh Kader PKK Desa Sukarasa harus dilakukan pengkajian ilmiah secara mendalam dengan melibatkan aspek-aspek yang berlandaskan teoretis.

Kehidupan bermasyarakat memiliki ciri khas pada keakrabannya dalam hubungan baik antar individu maupun antar kelompok dalam sebuah komunitas. Fenomena ini menghasilkan gagasan tentang modal sosial, yaitu keterkaitan dan jaringan antar anggota dalam suatu komunitas, yang memungkinkan kolaborasi dan pencapaian tujuan bersama yang salah satunya dimanfaatkan oleh Kader PKK Desa Sukarasa dalam menangani permasalahan *stunting*. Masyarakat pedesaan tentunya memiliki alasan untuk merasa bangga terhadap Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di desanya yang menjadi potensi perempuan luar biasa. PKK sebagai singkatan dari Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga adalah sebuah lembaga kemasyarakatan di tingkat desa atau kelurahan yang memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam upaya pemberdayaan kesejahteraan keluarga, beroperasi di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau dalam konteks lain dikenal sebagai koordinator kelompok dasawisma (Permendagri Nomor 26 Tahun 2020). PKK merupakan organisasi gerakan yang berasal dari bawah, di mana perempuan memegang peran kunci dalam upaya pembangunan, pembentukan, dan pemeliharaan kesejahteraan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Mereka tidak hanya terlibat dalam kegiatan PKK secara internal, tetapi memiliki berbagai keterampilan dan bakat yang memberikan manfaat besar bagi perkembangan desa.

Kader PKK selalu terlibat aktif dalam pelatihan kewirausahaan, penyuluhan kesehatan, pendidikan anak usia dini, hingga penanganan *stunting* untuk cakupan wilayah desa. Mereka juga memainkan peran penting dalam berbagai kegiatan sosial budaya di desa, seperti gotong royong, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu),

Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) hingga kegiatan yang bersifat kemitraan. Dengan keterlibatan aktif dan keberagaman keterampilan mereka, Kader PKK desa telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan desa. Sama halnya dengan komunitas lain, PKK sebagai organisasi pastinya memiliki modal sosial tersendiri dalam proses mencapai tujuan bersama.

Modal sosial merupakan konsep multidimensi yang mencakup hubungan dan jaringan dalam suatu komunitas, yang memengaruhi kemampuannya untuk mencapai tujuan bersama secara kolektif (Nuryanto dkk, 2020). Istilah modal sosial pertama kali dikemukakan oleh Hanifan (1916) dalam penelitiannya tentang faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan seorang kepala sekolah di Amerika Serikat. Hanifan mendefinisikan modal sosial sebagai kemauan baik, rasa persahabatan, dan kerjasama erat yang membentuk kelompok sosial, baik di dalam maupun di luar sekolah. Konsep modal sosial kemudian terlupakan selama 70 tahun hingga dipopulerkan kembali oleh Bourdieu (1986) dalam bukunya "*The Forms of Capital*". Bourdieu (1986) menyatakan bahwa modal sosial bersamaan dengan modal ekonomi, terdapat hal penting untuk dipahami yakni dari segi struktur dan fungsi sosial.

Coleman pada tahun 1988 menggunakan teori pilihan rasional untuk menganalisis proses sosial. Coleman (1988) menyimpulkan bahwa modal sosial berperan dalam menciptakan modal manusia dan modal sosial tersebut memiliki sifat yang produktif. Tanpa modal sosial, seseorang tidak mungkin mencapai keuntungan material atau keberhasilan yang optimal. Manfaat dari modal sosial ini hanya muncul dalam situasi tertentu. Contohnya, kerjasama positif dengan seorang

pejabat dapat menjadi modal sosial ketika dia berkuasa, tetapi bisa menjadi sebaliknya ketika pejabat tersebut tidak lagi berkuasa. Fukuyama (1995) menyatakan bahwa tingkat kepercayaan antar warga menentukan kesejahteraan, demokrasi, dan daya saing suatu masyarakat. Kepercayaan ini berakar pada budaya, etika, dan moral yang diwujudkan dalam perilaku saling membantu dan kerjasama. Keberhasilan ekonomi suatu negara dapat tercipta dari perpaduan harmonis antara organisasi ekonomi yang berskala besar, korporasi yang demokratis, dan nilai budaya seperti resiprositas, tanggung jawab moral, dan kepercayaan dalam masyarakatnya.

Gagasan tentang modal sosial ini bersifat kontekstual dan dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu *Bonding*, *Bridging*, dan *Linking*, tergantung pada skala dan jenis interaksi yang berbeda (Bakker, Koning, & Tatenhove, 2019). Ketiga jenis modal sosial tersebut memiliki penjabaran sebagai berikut: Pertama, *bonding social capital* mengacu pada hubungan saling kait-mengait antara norma, nilai, dan tindakan dalam suatu komunitas yang berperan dalam memperkuat kesatuan sosial dan identitas komunitas; kedua, *bridging social capital* diungkapkan sebagai interaksi-interaksi dan kolaborasi antara berbagai komunitas yang bertujuan untuk memperluas pemahaman atau pengetahuan dan aset-aset yang dimiliki oleh masing-masing komunitas yang berjejaring; ketiga, *linking social capital* mengacu pada kepercayaan hubungan lintas sektor dari komunitas terhadap pemegang kekuasaan atau para elit agar mampu menegosiasikan aksesibilitas terhadap sumber daya di masyarakat.

Berdasarkan teori tersebut, modal sosial memiliki peran penting dalam aspek kehidupan bermasyarakat terlebih untuk kehidupan di wilayah pedesaan. Hubungan antarwarga di wilayah pedesaan lebih banyak didasarkan pada nilai-nilai dan norma yang telah ada sejak lama, diwariskan dari generasi ke generasi. Nilai-nilai ini menjadi panduan bagi perilaku setiap masyarakatnya. Hubungan yang dibangun berlandaskan pada nilai-nilai dan norma ini menjadi perekat kuat bagi masyarakat dan memungkinkan mereka untuk mengatasi berbagai masalah sosial, budaya, dan ekonomi dengan memanfaatkan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat.

Bila merujuk pada konsep dari Bakker, dkk (2019) *bridging social capital* memiliki keunikan lebih jika dibandingkan *bonding social capital*. Pada *bridging social capital* tidak hanya membahas ranah internal dari sebuah komunitas, tetapi komunitas diluar jaringan internal akan terlibat dalam proses pembentukannya. Sehingga aspek yang terkandung didalamnya yaitu terdapatnya interaksi-interaksi dan kolaborasi-kolaborasi yang berguna dalam peningkatan pengetahuan dan basis-basis aset yang dimiliki oleh suatu komunitas. Pemanfaatan dari *bridging social kapital* sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan pemecahan masalah dalam sebuah komunitas. Sinergitas yang terbangun akan menguntungkan satu sama lain dan akan dapat memberikan manfaat bagi komunitas di masa depan (Bakker, Koning, & Tatenhove, 2019).

Pada penelitian Alfiansyah (2023) yang membahas modal sosial sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat, jalinan solidaritas dan kerjasama yang terbangun di masyarakat dalam menjalankan sebuah program mampu meningkatkan keberhasilan pembangunan di pedesaan. *Bridging social capital*

yang tercermin dalam penelitian itu ialah adanya kolaborasi antara pihak BUMDes dengan stakeholder yang menghasilkan terciptanya akses kesempatan terhadap lowongan pekerjaan, magang, dan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat sekitar. Kemudian dalam penelitian Hendraningsih (2023) menghasilkan temuan bahwa *bridging social capital* memberikan keuntungan dengan cara pertukaran sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keuntungan tersebut didapatkan dari relasi yang terbentuk oleh sebuah organisasi kepemudaan dengan tokoh masyarakat dan pemerintah desa setempat. Relasi tersebut terbangun dari adanya kedekatan dan partisipasi sosial yang menciptakan rasa saling percaya untuk bersinergi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian penelitian dari (Ola, Dkk 2020) yang berfokus untuk eksplorasi wujud *bonding* dan *bridging social capital* yang dimiliki oleh dua kelompok etnis di wilayah pesisir pulau-pulau kecil. Penelitian tersebut dilakukan dengan metode penelitian survey dan wawancara mendalam untuk menggali informasi dan data dari komunitasnya sebagai objek penelitian. Teori yang digunakan adalah teori modal sosial dari Bakker tahun 2019 dengan penentuan fokus penelitian pada implikasi atas relasi yang terbangun antara komunitas yang ada di wilayah pesisir tersebut. Hasil dari penelitian ini diantaranya didapatkan bahwa terdapat pertukaran dan kesamaan nilai, norma dan tindakan kolektif yang sama akan memperkuat *bonding social capital* yang dimiliki oleh sebuah komunitas. Kemudian untuk hubungan simbiosis mutualisme yang terjalin dipengaruhi oleh intensitas interaksi yang terjadi antar komunitas tersebut. Semakin intens interaksi terjadi maka *bonding* dan *bridging social capital* akan semakin menguat. Kekuatan *bonding* dan

bridging social capital yang terbangun akan meningkatkan dan memperluas pengetahuan, keterampilan, hingga aksesibilitas terhadap sumber daya yang sebelumnya tidak dimiliki oleh komunitas. Dari penelitian tersebut dapat dilihat bahwa *bridging social capital* dapat menjadi modal berharga bagi suatu kelompok, organisasi, maupun masyarakat dalam peningkatan dan pemerolehan kemanfaatan pada berbagai bidang seperti sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan pendapatnya Bakker dkk (2019) bahwa suatu komunitas atau masyarakat yang mempunyai ketahanan akan mampu secara terorganisir menggunakan jaringan sosialnya dalam upaya perluasan akses terhadap berbagai sumber daya diluar komunitasnya.

Penelitian terdahulu yang tercantum diatas berfokus pada upaya pemberdayaan masyarakat yang berimplikasi pada pembangunan ekonomi. Sedangkan pada penelitian ini mengupas pemanfaatan *bridging social capital* dalam mengatasi permasalahan kesehatan pada anak yaitu *stunting* oleh Kader PKK Desa Sukarasa. Dalam konteks penanganan *stunting* oleh Kader PKK Desa Sukarasa sendiri, *bridging social capital* yang dimilikinya akan dilihat dari interaksi dan kolaborasi dengan tokoh masyarakat, pemerintah setempat dalam hal ini pemerintah desa, petugas kesehatan dalam hal ini Puskesmas, dan organisasi kepemudaan yang ada disekitarnya yang berimplikasi pada perluasan pengetahuan dan basis aset dalam penanganan *stunting*.

Pada penelitian ini, peneliti akan mengeksplorasi *bridging social capital* yang dimiliki oleh Kader PKK Desa Sukarasa dalam menangani *stunting* dengan mengusung judul “*BRIDGING SOCIAL CAPITAL KADER PEMBERDAYAAN*

DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM PENANGANAN *STUNTING* DI DESA SUKARASA KECAMATAN MALANGBONG KABUPATEN GARUT”. Dalam arti lain penelitian ini berfokus pada menggali modal sosial menjembatani dari Kader PKK dalam memanfaatkan jejaring dan relasinya dengan pihak atau kelompok lain yang memiliki sumber daya dilihat dari aspek interaksi dan kolaborasi yang dapat memperluas pengetahuan dan basis aset yang dimilikinya dalam penanganan *stunting* di Desa Sukarasa Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut.

1.2. Perumusan Masalah

Dari konteks yang telah dijelaskan pada latar belakang, masalah yang akan menjadi titik fokus pada penelitian ini yaitu: “Bagaimana *Bridging Social Capital* Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Penanganan *Stunting*?” yang akan diuraikan dalam submasalah berikut.

- 1.2.1. Bagaimana interaksi Kader PKK Desa Sukarasa dengan jejaring sosialnya dalam menjembatani penanganan *stunting*?
- 1.2.2. Bagaimana kolaborasi Kader PKK Desa Sukarasa dengan jejaring sosialnya dalam menjembatani penanganan *stunting*?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian yang berjudul “*Bridging Social Capital* Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Penanganan *Stunting*” memiliki tujuan sebagai berikut:

1.3.1. Menggali informasi dan mendeskripsikan interaksi Kader PKK Desa Sukarasa dengan jejaring sosialnya dalam menjembatani penanganan *stunting*.

1.3.2. Menggali informasi dan mendeskripsikan kolaborasi yang dibangun Kader PKK Desa Sukarasa dengan jejaring sosialnya dalam menjembatani penanganan *stunting*.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul “*Bridging Social Capital* Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Penanganan *Stunting*” memiliki manfaat sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoretis

Dalam manfaat teoretis, diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pembelajaran mata kuliah modal sosial dalam proses pemberdayaan masyarakat. Selain itu, penelitian tentang modal sosial ini diharapkan dapat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan bahwa modal sosial menjembatani atau *bridging social capital* memiliki andil dalam proses pemberdayaan masyarakat maupun dalam skala komunitas. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya temuan ilmu pengetahuan pada ilmu sosial khususnya dalam ranah pekerjaan sosial.

1.4.2. Manfaat Praktik

Dalam manfaat praktisnya, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan dukungan kepada Pemerintahan Desa Sukarasa dalam peningkatan produktivitas organisasi PKK. Selain itu diharapkan pemerintah desa dan TP PKK

untuk memanfaatkan dan meningkatkan modal sosial Kader PKK sebagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak dari wilayah pedesaan khususnya dalam mengatasi masalah *stunting*. Selain itu, penelitian ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu yang relevan, terutama yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan di pedesaan. Dengan menyebarkan hasil penelitian melalui berbagai saluran komunikasi, informasi dan pemahaman tentang topik yang diteliti dapat tersebar secara lebih luas. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada pemahaman dan tindakan masyarakat dalam menangani berbagai tantangan yang dihadapi di Desa Sukarasa.

1.5. Sistematika Penulisan

Proses penulisan hasil penelitian ini terdiri dari enam bab dengan uraian sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB II LANDASAN KONSEPTUAL, memuat tentang penelitian terdahulu beserta teori yang relevan dengan topik penelitian yaitu teori Modal Sosial, *Bridging Social Capital*, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, *Stunting*, serta Tinjauan Teori Pada Praktik Pekerjaan Sosial.
- BAB III METODE PENELITIAN, memuat tentang desain penelitian, sumber data, definisi operasional, populasi dan sampel, teknik pengumpulan

data, teknik analisa data, serta jadwal penelitian dan langkah-langkah penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat tentang deksripsi dan analisis dari hasil penelitian, serta mengupas bahasan tentang interaksi dan kolaborasi dari Kader PKK dalam penanganan *stunting* di Desa Sukarasa Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut

BAB V USULAN PROGRAM, memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan pelaksanaan program, saasaran program, pelaksana program, metode dan teknik pelaksanaan program, isi kegiatan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan dari program, serta indikator keberhasilan dari program

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN, memuat kesimpulan dari hasil penelitian beserta saran yang berkaitan dengan implementasi program dan penelitian lanjutan.